

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi pada era globalisasi ini sangatlah cepat. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang dalam dalam berkomunikasi, arus informasi menjadi tidak terbandung dan terus mengalir sangat cepat. Paradigma kehidupan masyarakat menjadi bergeser. Adanya tuntutan dalam kesetaraan mendapatkan akses informasi, akses pelayanan, dan kecepatan akses transaksi.

Beberapa negara maju sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk digital yang dapat melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan baru dengan istilah *electronic government (E-Government)* (Indrajit, 2002). *Electronic government* adalah pemakaian atau penggunaan teknologi dan informasi untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan public melalui pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga bertanggung jawab terhadap perubahan secara efektif .

Indonesia sudah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-undang dasar negara republik

Indonesia tahun 1945 pasal 28 f yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan demikian, maka hak atas informasi keterbukaan publik tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.

Dinas Komunikasi informatika dan Statistik provinsi Riau telah menerapkan sistem *E-government* yang artinya dikatakan bahwa telah terdapat peningkatan komunikasi publik yang dalam hal ini adalah media cetak dan media elektronik. Dalam perkembangannya komunikasi massa yang sudah modern salah satunya adalah media internet. Jika ditinjau dari fungsinya komunikasi massa dengan media internet merupakan bentuk dari komunikasi massa (Nurudin, 2011 : 5) . Teknologi informasi secara online/internet merupakan Komunikasi massa yang berguna untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintahnya, dan aparatnya yang diaplikasikan pada peningkatan efisiensi internal, administrasi public, pelayanan public guna menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Electronic government pada dasarnya memiliki sebuah keinginan untuk menstransformasi pelayanan public dan bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya yang terkesan birokratis menjadi lebih bersahabat dan mudah. Peningkatan kualitas pelayanan dari pemerintah kepada *stakeholder* dalam bentuk

efektivitas kinerja serta efisiensi dalam berbagai kehidupan bernegara. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ITC) dengan ruang lingkungannya adalah :*government to citizens* (Pemerintah kemasyarakatan), *government to business* (pemerintah ke pelaku usaha), *government to government* (pemerintah ke pemerintah), dan *government to employees* (Pemerintah ke aparatnya).

Maka untuk meningkatkan pelayanan dari pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pemerintah, maupun pemerintah ke pelaku bisnis, Diskominfo dan Statistik provinsi Riau yang terletak di l. Jend Sudirman No. 460 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Pekanbaru Kota, sebagai ladang sektor telah membentuk *e-office*, GSB (government service bus) di Provinsi Riau melalui *government service bus*, yaitu e-kepegawaian, e-keuangan, *e-monev*, *e-LPSE*, *e-ULP*, *Server sistem Database Dukungan kebijakan Daerah (SDDKD)*, *e-Profil kesehatan*, *e-Simple* dan *e-planning*. Maksud dan tujuan dibuatnya situs ini adalah untuk mengkomunikasikan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh sebuah pemerintahan beserta pertanggungjawaban kepada rakyat yang diwakilinya (Niko Andrianto, 2007 : 80-81).

Wujud pemerintah provinsi riau dalam meningkatkan komunikasi publik dapat dilihat dari penerapan *e-government* kedala SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 1.1
E-goverment dalam SKPD Pemerintahan Provinsi Riau

No	Nama SKPD	Keterangan
1	2	3
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	- Memiliki website bappeda.riau.go.id - e-office ada - memiliki aplikasi berbasis web yaitu e-planning dan simonev
2.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau	- memiliki e-office - memiliki forum bedah buku online
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	- memiliki website bpkad.riau.go.id - memiliki e-office - memiliki aplikasi berbasis web SIPKD dan aplikasi berbasis desktop ASET
4.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau	- memiliki website bp2t.riau.go.id - memiliki e-office - memiliki aplikasi berbasis web Layanan Perizinan Online
5.	Dinas Bina Marga	- memiliki website binamarga.riau.go.id - memiliki e-office - memiliki aplikasi kerusakan jalan
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	- memiliki website disdik.riau.go.id - memiliki aplikasi DAPODIK dan aplikasi guru bantu - memiliki e-office
7.	Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Provinsi Riau	- memiliki website diskominfo.riau.go.id - memiliki e-office - memiliki aplikasi

		SDDKD, riau drive, mail, data hosting
8.	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau	- memiliki website dipenda.riau.go.id - memiliki aplikasi pajak kendaraan
9.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau	- memiliki website - memiliki aplikasi DB Olahraga
10.	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	- memiliki website dinkes.riau.go.id - memiliki e-office - memiliki aplikasi
11.	RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau	- memiliki website rsudarifinachmad.riau.go.id - memiliki aplikasi SIM RS

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan data elektronik provinsi Riau, Rancangan akhir Renstra SKPD 2014-2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 11 SKPD yang sudah diperbarui didukung oleh keterbukaan untuk memberikan informasi kepada public. Bentuk keterbukaan public yang dilakukan oleh diskominfo dan 11 SKPD tersebut adalah memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan seluruh SKPD yang ada di Provinsi Riau. Selain itu bentuk informasi public yang diberikan oleh diskominfo adalah perkembangan Daerah dan kejadian yang ada di provinsi Riau, informasi peluang usaha, informasi bantuan pemda, dan informasi yang dapat dikonsumsi secara umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah, maka transparansi di tingkat pemerintah akan

terwujud, karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang seharusnya diberikan kepada public.

Dinas komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Riau juga merupakan perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi. Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Laporan Kerna Dinas Komunikasi, informatika dan statistik provinsi Riau, 2015 : 1).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014- 2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Adapun Visi dan Misi Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah dengan Visi : Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing, dan Misi :

1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau
2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, professional, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar

Dengan itu tentu terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menjalankan Visi dan Misinya yaitu :

1. Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Tujuan yang dibuat ini memiliki sasaran pencapaian diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau
3. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika (Laporan Dinas Komunikasi, informatika dan statistik provinsi Riau , 2015 : 1)

Pengembangan *e-government* dalam mendukung keterbukaan publik tidaklah mudah dilakukan banyak kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, banyak kendala yang dapat ditemui, mulai dari kendala yang berasal dari diskominfo dalam artian adalah orang-orang yang bertugas dalam penyebarluasan informasi,

keterbatasan jumlah pegawai dalam pemantauan atau mengontrol pusat informasi yang ada di Diskominfo dan Statistik Pro.Riau.

Selanjutnya adalah kendala teknis, seperti kurangnya atau minimnya Sarana dan prasarana Pendukung, keterbatasan akses Jaringan, kendala pada masyarakat itu sendiri yaitu dapat berupa kurangnya pemanfaatan atau penggunaan media informasi publik itu sendiri oleh masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya intensitas pengunjung website yang menyediakan keterbukaan informasi publik, sehingga intensitas pesan yang ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Kendala yang terbesar yang ditemui oleh masyarakat adalah masyarakat masih mempertanyakan peran Diskominfo hal ini terjadi karena karena masih minimnya informasi yang disebarkan oleh Diskominfo kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang berminat atau bahkan tidak tertarik untuk mengakses informasi publik yang disediakan oleh diskominfo dan statistik Prov.Riau.

Diskominfo dan Statistik Provinsi Riau yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *gatekeeper* adalah orang yang sangat berperan dalam menyebar luaskan informasi melalui media massa dan dalam penelitian ini adalah media online. *gatekeeper* berfungsi sebagai orang yang ikut menambah, mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan mudah dipahami. *Gatekeeper* disini juga berperan menentukan kualitas suatu informasi dalam komunikasi massa (Nurudin, 2011 : 31-33).

Dalam menyebarkan informasi baik ke masyarakat secara umum dan kepada investor atau pengusaha-pengusaha yang akan mempengaruhi bentuk penyampaian serta cara informasi itu diberikan tentu guna memperkenalkan dan menarik perhatian serta minat para investor serta pengusaha agar mengetahui sejauhmana perkembangan provinsi Riau yang dapat akhirnya penyebaran informasi tersebut dapat menarik minat mereka untuk dapat menanam saham atau menyediakan modal bagi pemerintah guna pembangunan daerah kearah yang lebih baik, seperti halnya yang dilakukan Diskominfo dalam mendukung keterbukaan informasi yang menyoroti seluruh tingkatan daerah Riau mulai dari tingkat kecamatan yang akan berdampak positif bagi masyarakat serta pengusaha dan investor di tingkat kecamatan dalam memperoleh informasi untuk mengontrol atau untuk mendapatkan informasi terbaru dan kemajuan daerah serta informasi seputar pemerintahan di tingkat kecamatan.

Permasalahan yang sering timbul atau sering ditemukan publik yang dalam hal ini bukan hanya masyarakat melainkan para pengusaha dan investor dalam mengakses informasi publik adalah masih rendahnya atau masih sedikitnya intensitas pesan atau informasi yang disampaikan melalui diskominfo provinsi Riau pada masyarakat Pekanbaru, contohnya dalam mengakses informasi di media *online* yang didapat adalah berita atau informasi yang sudah beberapa hari, artinya informasi terbaru yang ingin dicari atau diakses oleh masyarakat tidak dapat ditemui atau diakses oleh masyarakat secara *update*.

Penyebarluasan informasi publik yang dilakukan Diskominfo dan statistik provinsi riau, melalui media website resmi provinsi Riau diantaranya adalah (www.riau.go.id) (www.diskominfo.riau.go.id) dan (www.mediacenter.riau.go.id) dengan perkembangan jumlah kunjungan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pengunjung website yang dikelola Diskominfo dan statistic Provinsi Riau

N o.	WEBSITE	2013	2014	2015	2016	2017
1	www.riau.go.id	64.807	65.823	73.647	79.634	82.634
2	www.diskominfo.riau.go.id	2.316	3.547	3.983	4.735	4.982
3	www.mediacenter.riau.go.id	105.922	106.936	107.423	107.983	108.267

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan data elektronik provinsi Riau, Rancangan akhir Renstra SKPD 2014-2019

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa masih kecilnya perkembangan jumlah kunjungan website yang dikelola oleh diskominfo Provinsi Riau, dan website yang paling sedikit mendapatkan kunjungan masyarakat adalah website resmi diskominfo. Hal ini dapat terlihat bahwa keterbukaan informasi public yang dilakukan diskominfo belum maksimal, namun Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik di provinsi Riau sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya belum merata dengan dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah melakukan beberapa program dalam mendukung keterbukaan informasi publik seperti adanya website dan situs resmi pemerintahan, Pelatihan kepada pegawai aparat dan pegawai serta masyarakat guna kelancaran keterbukaan informasi public.

Adapun bentuk informasi yang disediakan atau disajikan oleh diskominfo adalah dalam bentuk *headline news* berita terbaru yang ada di Riau, perkembangan saham-saham asing yang ada di Riau, Peluang investor atau investasi yang disediakan Pemda, berbagai bantuan yang disediakan pemda, serta program kerja kepala daerah yang perlu dukungan serta pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan untuk diteliti lebih jauh tentang peranan Pemerintah Provinsi Riau dengan judul :**“Peran DISKOMINFO dan STATISTIK Prov. Riau dalam Mendukung Keterbukaan Informasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengetahuan pengelola informasi yang ada di Diskominfo dan statistik Provinsi Riau
2. Keterbatasan jumlah pegawai dalam pemantauan dan kontrol pusat informasi yang ada di Diskominfo dan statistik Provinsi Riau
3. Sarana dan Prasarana Pendukung
4. Jaringan akses
5. Pemanfaatan atau penggunaan informasi itu sendiri dalam memberikan informasi publik.

6. Peran Diskominfo dan Statistik masih sering dipertanyakan publik tentang informasi yang disebarkan.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Diskominfo dan Statistik masih sering dipertanyakan masyarakat tentang informasi yang disebarkan.
2. Faktor penghambat dalam penyebarluasan informasi public yang dilakukan Diskominfo dan Statistik

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik ?
2. Faktor penghambat apa saja yang ditemukan Peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik
 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik
- b. Manfaat penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya wawasan ilmu komunikasi tentang peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar masyarakat umum mengerti mengenai tentang peran Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik guna mendapatkan citra positif.

3. Manfaat Akademis

Pada bagian akademis tentunya peneliti hendak mencoba memberikan manfaat yang nantinya akan dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai aspek pendidikan ataupun akademis. Peneliti mengharapkan akan memberikan manfaat bagi para akademisi khususnya mengenai Dinas komunikasi, informatika dan statistik Provinsi Riau.